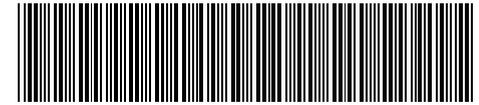




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 135.05.2.693009/2025**



DS:0010-0690-0350-5019

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

**Revisi ke 01**

Tanggal : 21 Februari 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
3. Provinsi : (25) PAPUA
4. Kode>Nama Satker : (693009) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA
- Sebesar : Rp. 1.848.124.000 ( SATU MILIAR DELAPAN RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA SERATUS DUA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

		Jumlah Uang
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.848.124.000
135.05.BF.7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 1.848.124.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- |                               |     |               |                                |     |   |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni               | Rp. | 0             | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP                       |     |               | - Pinjaman Dalam Negeri        | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan              | Rp. | 1.848.124.000 | - Hibah Dalam Negeri           | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0             | 5. Hibah Langsung              | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri        | Rp. | 0             | - Hibah Luar Negeri Langsung   | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri           | Rp. | 0             | - Hibah Dalam Negeri Langsung  | Rp. | 0 |
|                               |     |               | 6. SBSN PBS                    | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAYAPURA (063) Rp. 1.848.124.000

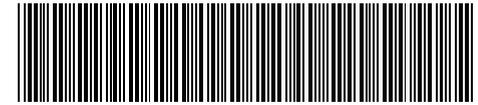
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
SUAHASIL NAZARA  
NIP. 197011231999031006

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693009/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0010-0690-0350-5019

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
Provinsi : (25) PAPUA  
Kode>Nama Satker : (693009) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA

Halaman : I A. 1

Program	:	135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			1.848.124.000
Kegiatan	:	7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah			1.848.124.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah			
		2. 01	Persentase masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah			
		3. 02	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7121.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	560,00	Orang	1.711.276.000
Rincian Output	:	01	BDC.001 Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah	310.00	Orang	955.415.000
		02	BDC.002 Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	100.00	Orang	695.861.000
		03	BDC.003 Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	150.00	Orang	60.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7121.BKB	Pemantauan produk	3,00	Produk, Layanan	136.848.000
Rincian Output	:	01	BKB.001 Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	3.00	Layanan	136.848.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

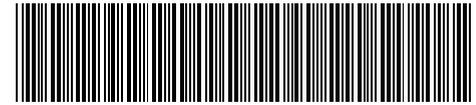
ttd.  
RAZILU  
NIP. 196511281991031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

**NOMOR : DIPA- 135.05.2.693009/2025**

**I B. SUMBER DANA**



DS:0010-0690-0350-5019

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM  
 Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
 Provinsi : (25) PAPUA  
 Kode>Nama Satker : (693009) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA

1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	1.848.124.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	Pagu	0	Rp.	Ekuivalen Rupiah	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$		0	Rp.		0
2. PNPB	Rp.	1.848.124.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$		0	Rp.		0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$		0	Rp.		0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR		0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR		0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR		0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR		0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693009/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0010-0690-0350-5019

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
Provinsi : (25) PAPUA  
Kode>Nama Satker : (693009) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693009	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA	-	1.848.124	-	-	-	1.848.124		
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.848.124	-	-	-	1.848.124		
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	-	1.848.124	-	-	-	1.848.124		
7121.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	1.711.276	-	-	-	1.711.276	25 . 51	
04	PNBP	-	1.711.276	-	-	-	1.711.276	063@	
7121.BKB	Pemantauan produk (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	136.848	-	-	-	136.848	25 . 51	
04	PNBP	-	136.848	-	-	-	136.848	063@	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>1.848.124</b>	-	-	-	<b>1.848.124</b>		

Jakarta, 02 Desember 2024  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.  
RAZILU  
NIP. 196511281991031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693009/2025  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0010-0690-0350-5019

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
Provinsi : (25) PAPUA  
Kode>Nama Satker : (693009) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693009	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	1.000	142.359	256.474	170.582	196.142	371.594	162.401	88.606	84.605	312.963	60.398	1.000	1.848.124
		<b>BELANJA BARANG</b>	1.000	142.359	256.474	170.582	196.142	371.594	162.401	88.606	84.605	312.963	60.398	1.000	1.848.124
	135.05.BF.7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	1.000	142.359	256.474	170.582	196.142	371.594	162.401	88.606	84.605	312.963	60.398	1.000	1.848.124
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	1.000	142.359	256.474	170.582	196.142	371.594	162.401	88.606	84.605	312.963	60.398	1.000	1.848.124

Jakarta, 02 Desember 2024  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.  
RAZILU  
NIP. 196511281991031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693009/2025  
IV A. B L O K I R**



DS:0010-0690-0350-5019

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
Provinsi : [25] PAPUA  
Kode dan Nama Satker : [693009] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA

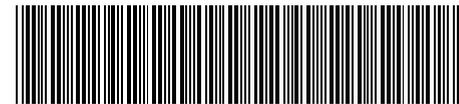
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
<b>693009</b>	<b>KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA</b>		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 1.348.124		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 1.348.124	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)
<b>135.05.BF</b>	<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 106.383
<b>7121</b>	<b>Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah</b>		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
<b>7121.BDC</b>	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat</b>		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 141.936		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 101.336
	Efisiensi Belanja K/L		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	<b>7121.BKB</b>	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522141 Belanja Sewa(PNBP)		<b>Pemantauan produk</b>
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.000		521211 Belanja Bahan(PNBP)
	Efisiensi Belanja K/L		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 18.602
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Efisiensi Belanja K/L
	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.000		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Efisiensi Belanja K/L		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 23.560
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.000		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)
	Efisiensi Belanja K/L		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 28.331
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 882.976		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.000		

Jakarta, 02 Desember 2024  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.  
RAZILU  
NIP. 196511281991031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693009/2025  
IV B. C A T A T A N**



DS:0010-0690-0350-5019

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
Provinsi : [25] PAPUA  
Kode dan Nama Satker : [693009] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.  
RAZILU  
NIP. 196511281991031002